**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku.**

A.W. Widjaja, 2006. *Administrasi Kepegawaian*, Bandung: Rajawali.

Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Cet. Pertama, Gava Media, Yogyakarta.

Amin Priatna, *Disertasi Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan,* Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008

Ani Sri Rahayu, 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Ani Sri Rahayu, 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta: Timur.

Arifin Tahir, 2020, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Cet. Ketiga, Alfabeta, Bandung.

Bachtiar, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press.

Bahder Johan Nasution., 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV, Mandar Maju.

Bambang Rudito, dkk, 2016, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta.

Eko Prasojo, 2020, *Memimpin Reformasi Birokrasi Kompleksitas Dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta.

Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.

Heinz Weihrich and Haroid Koontz, 1993. *Management A.Global Perspective Tent Edition*, New York: McGraw-Hill.

I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.

Ismail Namawi, 2009. *Public Policy*, Surabaya: PMN.

Jimly Assiddiqie, 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Perss.

Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2018, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Cet. Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2019. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Lili Rasjidi, 2011. *Sejarah Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Luthfi J. Kurniawan, 2017. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Setara Press.

M.Manullang, 2005. *Dasar–Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada.

Miftah Thoha, 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Cet. Keempat, Kencana, Jakarta.

Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cet. Pertama, Kaukaba, Yogyakarta.

Musanef, 1996. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta. Gunung Agung.

Noeng Muhadjir, 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, 2010. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: CV, Pustaka Setia.

Ridwan H.R., 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Rajawali Press.

Safri Nugraha, 2005. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sedarmayanti, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama.

Sondang P. Siagian, 2014. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Sri Hartini, dkk, 2014. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Cetakan III, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudibyo Triatmodjo, 1983. *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunarmi, 2016. *Sejarah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

W. Riawan Tjandra, 2013. *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

**B. Peraturan Perundang-Undang.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

**C. Internet/Journal.**

A. Rosyid Al Atok, Negara Hukum Indonesia, Makalah disampaikan dalam Kajian Rutin di Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, dengan tema “Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila”. Jum’at, 22 April 2016

Achmad Irwan Hamzani, 2014, “*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*”, Jurnal Yustisia, Edisi 90 September – Desember.

Agung Kurniawan Dan Suswanta, 2020, “*Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 05 Nomor 01 Agustus.

Aidul Fitriciada Azhari, 2012, “*Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 19 Nomor 4, Oktober.

Ali Abdul Wakhid, 2011, “*Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*”, Jurnal Tapis, Volume 7 Nomor 13, Juli-Desember.

Amelia Martira Dan Harsanto Nursadi, 2020, “*Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional*”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 50 Nomor 1.

Arief Hidayat, “*Negara Hukum Berwatak Pancasila*”, Disampaikan dalam kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019 serta juga pernah disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada 9 September 2017 bertempat di Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP\_Peraturan\_kebijakan\_di\_Kementerian\_PPN\_bappenas.pdf.

Atang Hermawan Usman, 2014, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30 Nomor 1 Februari.

Benny Daryono, *Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet I, BPSDM KUMHAM Press, Depok, 2020

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019, “*Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham*)”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1.

E-Journal, Bilal Derwansyah, Kedudukan Peraturan Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan, [*https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan*](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan).

E-Journal, Eprints, [*https://eprints.uny.ac.id/24013/3/BAB%20II.pdf*](https://eprints.uny.ac.id/24013/3/BAB%20II.pdf).

E-Journal, Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,

E-Journal, Researchgate Publication Hukum Kelembagaan Negara Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi.E-Journal, LinovHR, Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural dalam Kepegawaian Pemerintah, https://www.linovhr.com/jabatan-fungsional-dan-jabatan-struktural/

Farda dwi, Pengaruh Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan, S1 Kearsipan, Universitas Brawijaya, 2013

Fikri Habibi, 2020, “*Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi Di Indonesia Research Mapping Of Bureaucratic Reform In Indonesia*” Jurnal Borneo Administrator, Volume 16 Nomor 2.

Haposan Siallagan, 2016, “*Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 Nomor 2 Juli.

Happy Susanto, 2016, “*Remunerasi Dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia*” Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 01 Nomor 01, April.

Hendrikus Triwibawanto Gedeona, 2013, “*Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?*”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X Nomor 2, Agustus.

https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/414/241 diakses pada tanggal 26 Februari 2022

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/470698/pengangkatan-penjabat-kepala-daerahdari-asn-sangat-riskan-dilakukan diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

I Wayan Wesna Astara, 2016, “*Dinamika Birokrasi Dan Perlunya Reformasi Birokrasi Lingkungan*”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 1, Desember.

Imam Ropii, 2015, “*Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah (Konsepsi Dan Dinamikanya)*”, Maksigama Jurnal Hukum, Tahun 18 Nomor 1 Periode November.

Internet, https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/63787/MzA1ODkx/Prosedur-Kenaikan-Pangkat-Pegawai-Negeri-Sipil-PNS-di-Sekretariat-Daerah-Kabupaten-Magetanpdf.

Internet, *Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional,* http://bkd.jabarprov.go.id/uploads/media/upload-gambar-pendukung/ppt%20jafung.pdf

Internet, *Sistem Merit,* *Komptensi, dan Kinerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, www.bppk.kemenkeu.go.id,

Jaenudin*, jurnal Administrasi Negara*, Vol 21 No 2, Agustus 2015

Janpatar Simamora, 2014, “*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3, September.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia diakses pada tanggal 26 Februari 2022.

Jorawati Simarmata, 2015, “*Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective Of Local Policy In Contex Of Law Number 23 Of 2014 On Local Government And Other Related Laws)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 Nomor 2.

Lesmana Rian Andhika, 2019, “*Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah (Public Policy Modeling: Overview And Analysis For Government Policy Brief*”, Jurnal Riset Pembangunan, Volume 2 Nomor 1.

Lili Romli, 2008, “*Masalah Reformasi Birokrasi*” Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume 2 Nomor 2, November.

M. Fachri Adnan, 2013, “*Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik*”, Jurnal Humanus, Volume XII Nomor 2.

Made Hendra Wijaya, 2015, “*Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*”, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2, September.

Maleha Soemarsono, 2007, “*Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-37 Nomor 2 April-Juni.

Meita Istianda Dan Darmanto, 2009, “*Pelayanan Birokrasi Di Era Reformasi, Bagaimana Seharusnya*?”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9 Nomor 2 Juli.

Mifta Farid, dkk, 2017, “*Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*”, Jurnal Lentera Hukum, Volume 4 Nomor 2.

Mohammad Thahir Haning, 2018, “*Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik*”, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 Nomor 1, Juni.

Novy Setia Yunas, 2016, “*Kepemimpinan Dan Masa Depan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*”, Jurnal Dimensi, Volume 9 Nomor 2.

R Siti Zuhro, 2010, “*Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 7 Nomor 1.

R. Agus Abikusna, 2019, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Jurnal Sosfilkom, Volume XIII Nomor 01, Januari-Juni.

Ratna Ani Lestari, 2019, “*Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik*”, Jurnal Dinamika Governance Fisip Upn “Veteran” Jatim, Volume 9 Nomor 1, April.

[Researchgate Publication *Hukum Kelembagaan Negara Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi*](http://www.researchgate.net/publication/330981083_HUKUM_KELEMBAGAAN_NEGARA_Kajian_Teoritis_Perkembangan_Lembaga_Negara_Pasca_Reformasi).

Septi Nur Wijayanti, 2016, “*Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”, Jurnal Media Hukum, Volume 23 Nomor 2, Desember.

Suwarno, 2008, “*Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik*”, Jurnal UNISIA, Volume XXXI Nomor 69 September.

Yusriadi, 2018, “*Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan Indonesian Bureaucratic Reform: Opportunities and Obstacles*”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 2, Desember.

Zaini Juniansyah D, 2021, “*Upaya Badan Kepegawaian Daerah Mengimplementasikan Kebijakan Disiplin ASN dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Agam*” Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Volume 1 Nomor 2 Edisi Juli–Desember.

Zulkarnain Ridlwan, 2012, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 Mei-Agustus.